eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6(1) 265-280
ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

PEMBERIAN SANKSI *EXECUTIVE ORDER* TERHADAP PEJABAT VENEZUELA MASA PEMERINTAHAN MADURO OLEH AMERIKA SERIKAT

Veramia Bonita[1]
Nim. 1302045114

Abstract

The purpose of this study was to find out the reasons for appropriation executive order sanction against Venezuelas officials under Maduro regime by US. The analysis was used the theory of decision making. Supported by use explanative research type. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used by the author based on the book and the internet media through some valid websites. The results of this research presented that the reason for appropriation executive order sanction against Venezuelas officials under Maduro regime by US was US efforts to be viewed internationally such as proctecting democracy and human rights in Venezuela. Sanctions are also caused by several other factors and to weaken the Maduro government. Those factors are internal factors the value of US democracy and US company, external factors are inter-american democratic charter, societies organized and functioning (CANVAS), as well as major characteristics of social organizations factor (USAID and NED).

Keywords: *Decision Making, Executive Order, Sanction, Venezuelas, United State of America*

Pendahuluan

Pasca kematian Hugo Chavez, Venezuela dipimpin oleh Nicolas Maduro yang menang dalam pemilihan presiden tahun 2013. Seperti Chavez, Maduro merupakan politikus sayap kiri yang mendukung program sosialisme untuk mengendalikan angka kemiskinan dan mengatur kontrol pemerintah terhadap lembaga negara maupun swasta dan media. Dia melanjutkan cita-cita Chavez yaitu "Revolusi Bolivarian" untuk mengubah Venezuela menjadi negara sosialis yang bertujuan memberantas buta huruf, menyalurkan makanan pokok, dan menyediakan layanan kesehatan ke seluruh negeri dengan mengandalkan hasil penjualan minyak.

Pada masa pemerintahannya, Maduro menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ini antara lain, penetapan harga bahan-bahan kebutuhan pokok oleh pemerintah seperti telur, tepung jagung, pasta dan susu. Harga tersebut jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh swasta (lihat tabel 1.1).

[1]Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : veramia89@gmail.com

Tabel 1.1 Harga Bahan Kebutuhan Pokok

Komoditi	**Harga**	
	Pemerintah	**Swasta**
Telur	18 Bs. F.	100 Bs. F.
Tepung Jagung	190 Bs. F.	195 Bs. F.
Pasta	15 Bs. F.	495 Bs. F.
Susu	70 Bs. F.	295 Bs. F.

Sumber: www.businessinsider.com

Dapat dilihat dari tabel di atas, persentase perbedaan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan swasta sekitar 9% hingga 30%. Kebijakan tersebut ditentang oleh pihak oposisi antara lain, Leopoldo Lopez dari Partai *Justice First*, Maria Corina Machado dari Partai *Democratic Unity Roundtable (MUD)* sekaligus anggota majelis nasional, Henrique Capriles dari Partai *Justice First* sekaligus gubernur Miranda, dan lain-lain.

Karena harga yang ditetapkan terlalu murah dan merugikan produsen, sebagian memilih menjual barang di pasar gelap dengan harga menjadi 15 kali lebih mahal dan menyelundupkan barang ke Kolombia lalu dijual dengan harga yang lebih mahal (www.businessinsider.com). Hal tersebut menyebabkan kelangkaan terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini diperparah dengan penurunan harga minyak dunia yang membuat Venezuela mengalami krisis ekonomi tahun 2014.

Berbagai pendapat menerangkan bahwa penyebab timbulnya krisis antara lain, karena ketergantungan pemerintah pada ekspor minyak dan inflasi yang mencapai 64% pada tahun 2014 (www.indexmundi.com). Krisis tersebut membuat rakyat menderita dan dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk menentang Maduro. Pihak oposisi memobilisasi kekuatan demonstrasi dan mengusulkan turunnya Maduro dari jabatan sebagai presiden. Pada 12 Februari 2014 yang merupakan "*Venezuela Youth Day*", beberapa mahasiswa dan kelompok oposisi melaksanakan demonstrasi di Caracas (Ibukota Venezuela), demonstran menyerang dan merusak sebuah gedung pemerintah, fasilitas medis, universitas, dan kantor regional komisi pemilu (Miguel Tinker Salas:2015).

Dalam menangani aksi protes tersebut, pemerintahan Maduro melakukan tindakan represif yaitu menggunakan kekuatan militer dengan mengerahkan pasukan tentara. Cara yang dilakukan pemerintah terhadap aksi protes tersebut seperti pemukulan, penembakan kesegala arah menggunakan peluru karet, mengeluarkan gas air mata, serta penembakan dengan senjata jarak dekat terhadap pemrotes anti pemerintah. Aksi protes tersebut mengakibatkan korban tewas sebanyak 43 orang, 870 terluka, dan 76 dari mahasiswa ditahan hingga Oktober 2014 (www.hrw.org).

Melihat situasi di Venezuela tersebut, Menteri Luar Negeri AS meminta Maduro untuk melakukan negosiasi dengan pihak oposisi. Namun, pihak oposisi dari partai MUD, menolak negosiasi pada mei 2014 setelah pemerintah menolak untuk melepaskan lebih dari 200 orang ditahan ketika polisi membubarkan aksi protes di Caracas (www.bbc.com). Disamping itu, senat AS membuat RUU untuk memberikan

sanksi terhadap para pejabat Venezuela yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pada, 18 Desember 2014 senat dan *House of Representatives* (HoR) AS menyetujui RUU *Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014* (www.congress.gov).

Pelanggaran HAM yang terjadi di Venezuela juga tidak sesuai dengan nilai demokrasi di dalam *Inter-American Democratic Charter*, dimana AS dan Venezuela merupakan negara anggota *Organizations of American States* (OAS) yang menyetujui piagam tersebut. Piagam tersebut berisikan bahwa setiap negara anggota yang menganggap bahwa hak asasi manusia telah dilanggar dapat menyajikan klaim atau petisi untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (www.oas.org). Kemudian, berdasarkan UU dan piagam tersebut, senat AS memberikan wewenang kepada Obama untuk mengeluarkan sanksi *executive order* pada 9 Maret 2015.

Sanksi ini ditujukan untuk orang yang terlibat dalam atau bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan lawan politik, pembatasan kebebasan pers, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan pemrotes anti pemerintah, serta korupsi publik yang signifikan oleh pejabat senior pemerintah di Venezuela. Sanksi tersebut berupa pembekuan aset dan pemblokiran properti yang ada di AS saat ini dan akan datang, dilarang berbisnis dengan orang AS dan sebaliknya, serta dilarang berkunjung ke AS (www.archives.gov).

Sanksi ditujukan kepada tujuh pejabat di pemerintahan Maduro yang namanya terdaftar pada *Specially Designated Nationals* (SDN) yang dikelola oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC), antara lain Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padron, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, dan Miguel Alcides Vivas Landino (www.presidency.ucsb.edu). Tujuh pejabat tersebut merupakan pejabat pro-pemerintahan Maduro dan semua memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Maduro. Mereka memiliki ideologi yang sama dengan Maduro yaitu sosialis dan anti imperialis. Sanksi AS yang berlaku efektif sejak 9 Maret 2015 dan 3 Maret 2016 setelah perbaruan hingga 2019 ini, secara umum tidak berdampak pada perekonomian Venezuela. Hal ini disebabkan karena sanksi hanya berlaku untuk orang-orang yang ditunjuk.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory)

Menurut Snyder, proses pembuatan keputusan adalah untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dibuat. Dalam pengambilan keputusan, negara merupakan aktor utama. Snyder juga mengemukakan bahwa *decision makers* membuat keputusan berdasarkan beberapa faktor, yaitu lingkungan internal terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, masyarakat dan lingkungan masyarakat yang berupa budaya atau populasi, lingkungan eksternal terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, kebudayaan lain, masyarakat lain, organisasi masyarakat dan lembaga fungsional dari aksi / tindakan pemerintah, serta struktur sosial dan perilaku terdiri dari kondisi utama nilai orientasi, institusional utama pola bentuk, karakteristik utama dari organisasi sosial, perbedaan aturan dan spesifikasi peranan, bentuk dan fungsi

kelompok, proses sosial yang relevan berupa pembentukan opini, sosialisasi orang dewasa, dan politik (James N. Rosenau:1969).

Lingkungan internal dan eksternal mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam pembuatan keputusan luar negeri. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri, sedangkan lingkungan eksternal dipengaruhi oleh beberapa variabel luar negeri. Lingkungan internal dan struktur sosial dan perilaku berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan lingkungan internal dan eksternal, serta struktur sosial dan perilaku, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi *executive order* terhadap tujuh pejabat Venezuela masa pemerintahan Maduro dalam respon terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Venezuela.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya. Data yang diperoleh dari studi literatur dan internet ini kemudian dianalisis menggunakan teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Hasil Penelitian

Perpolitikan dan Perekonomian Venezuela sebelum Pemerintahan Nicolas Maduro

Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, Venezuela mengalami krisis berturut-turut dan hanya mempunyai sedikit pengalaman tentang pemerintahannya sendiri, karena tahun-tahun kemerdekaannya dikacaukan oleh berbagai perang saudara, pemerintahan yang diktator, dan ketidakacuhan terhadap azas politik serta partai politik. Caldera memenangkan pemilu 1968 atas nama partai COPEI dan menjadi presiden pertama yang memenangkan pemilihan di era demokratis. Caldera melakukan kebijakan nasionalisasi yang membuat negara berhak atas pemanfaatan cadangan gas alam, perdagangan dalam negeri, dan kontrol terhadap aktivitas industri minyak. Dia juga membuka kembali hubungan dengan Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa lainnya.

Pasca terpilihnya Carlos Andres Perez sebagai presiden pada 1973, harga minyak dunia naik. Hal tersebut membuat negara mendapatkan keuntungan yang besar, gaji-gaji meningkat, kontrol harga dapat dilakukan, barang-barang impor disubsidi, dan hutang sebesar 350 juta dolar AS dalam bidang pertanian rakyat tidak perlu membayar pada negara. Venezuela mulai memberikan bantuan pinjaman internasional bagi impor minyak negara-negara Amerika Latin melalui *Venezuela Investment Fund* (VIF), juga memberi pinjaman kepada *Inter-American Development Bank* (IADB). Akibatnya, negara ini mendapatkan dukungan dari negara-negara Amerika Latin terkait independensi Venezuela dari hegemoni AS. Hubungan Venezuela-AS memburuk terkait embargo minyak OPEC, Terusan Panama, dan keterlibatan AS dalam menggulingkan presiden Chile.

Perez menduduki jabatan presiden kembali untuk yang kedua kalinya pada 1989. Kebijakan yang diambilnya sangat berbeda dengan periode pertama dia berkuasa yaitu dengan mengambil paket neoliberal yang disponsori oleh IMF. Konsekuensinya, privatisasi industri milik negara, penghilangan subsidi-subsidi, dan devaluasi mata uang harus dilakukan. Kesepakatan ini membuka Venezuela bagi perusahaan-perusahaan asing untuk mengeksploitasi aset ekonominya. Produk-produk asing terutama dari AS juga membanjiri pasar dalam negeri. Rakyat menjadi tergantung terhadap produk-produk tersebut dan kemampuan untuk menghasilkan produk non-minyak sangat rendah.

Hugo Chavez melakukan perubahan konstitusi pasca terpilih sebagai presiden pada 1998. Kemudian, pendapatan minyak dikuasai untuk melayani rakyat dengan cara menasionalisasi *Petróleos de Venezuela, S.A.* (PDVSA). PDVSA merupakan perusahaan minyak negara yang paling besar dan paling banyak mempekerjakan buruh.Pada masanya berbagai proyek sosial, ekonomi, dan kebudayaan telah dilakukan sejak terpilih sebagai presiden hingga wafat pada 2013. Penderitaan rakyat akibat kebijakan yang menindas pada pemerintahan sebelumnya, dihapuskan dengan program-program sosial untuk memenuhi hak dasar mereka berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Dampak dari kebijakan revolusioner yang dilakukan pemerintahannya menjadikan Venezuela mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang negara itu berdiri, wabah buta huruf dapat dihilangkan pada 2005, angka kemiskinan, kematian bayi dan anak, serta pengangguran menurun drastis selama Chavez memerintah.

Perpolitikan dan Perekonomian Venezuela Pemerintahan Nicolas Maduro

Maduro memenangkan pemilihan presiden pada 2013, namun partai MUD mengatakan bahwa terjadi kecurangan pada hasil pemilu. Capriles menuntut penghitungan ulang karena menolak untuk mengakui hasil yang valid. Namun, Mahkamah Agung Venezuela memutuskan bahwa di bawah konstitusi, Nicolas Maduro adalah presiden yang sah. Dia kemudian secara resmi dilantik sebagai Presiden pada 19 April 2013. Sejak terpilih menjadi presiden, Maduro melanjutkan berbagai kebijakan Chavez. Pada masa pemerintahannya, terjadi kekurangan bahan pokok makanan, pasokan obat-obatan, dan kekeringan, serta penurunan harga minyak dunia yang membuat Venezuela mengalami krisis ekonomi pada 2014.

Kemudian, pada Februari 2014 ratusan ribu rakyat yang dipimpin pihak oposisi melakukan demonstrasi akibat krisis yang disebabkan oleh kebijakan dari pemerintahan Maduro. Dalam menangani aksi protes tersebut, pemerintahan melakukan tindakan represif yaitu menggunakan kekuatan militer dengan mengerahkan pasukan tentara. Cara yang dilakukan pemerintah terhadap aksi protes tersebut seperti pemukulan, penembakan kesegala arah menggunakan peluru karet, mengeluarkan gas air mata, serta penembakan dengan senjata jarak dekat terhadap pemrotes anti pemerintah yang dilakukan oleh GNB (www.hrw.org). Aksi protes tersebut mengakibatkan korban tewas sebanyak 43 orang, 870 terluka, dan 76 dari mahasiswa ditahan hingga Oktober 2014. Pada 19 Februari 2014 tanpa adanya perintah pengadilan, SEBIN menangkap Walikota Caracas Antonio Ledezma dan pihak oposisi Leopoldo Lopez untuk dugaan konspirasi menggulingkan pemerintah

(www.hrw.org). Pemerintah juga membatasi kebebasan pers dan media seperti yang dilaporkan oleh organisasi non pemerintah, *Institute for Press and Society* (IPYS).

Melihat situasi di Venezuela tersebut, Menteri Luar Negeri AS meminta Presiden untuk melakukan negosiasi dengan pihak oposisi. Namun, pihak oposisi dari partai MUD, menolak negosiasi pada Mei 2014 setelah pemerintah menolak untuk melepaskan lebih dari 200 orang ditahan ketika polisi membubarkan aksi protes di Caracas (www.bbc.com). Disamping itu, senat AS membuat RUU untuk memberikan sanksi terhadap 7 pejabat Venezuela yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pada, 18 Desember 2014 senat dan HoR AS menyetujui RUU *Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014.*

Akibat dari krisis ekonomi dan politik yang terjadi, Maduro lima kali memerintah dengan dekrit. Pertama, 19 November 2013 hingga 19 November 2014 untuk memerangi korupsi di pemerintahan. Kedua, 15 Maret 2015 hingga 31 Desember 2015 untuk menghadapi agresi dari AS karena menjatuhkan sanksi kepada 7 pejabat Venezuela. Ketiga, 15 Januari 2016 hingga 17 Mei 2016 tentang keadaan darurat ekonomi, menaikkan harga BBM dari 0,01 dolar AS menjadi 0,60 dolar AS per liter, menurunkan nilai tukar resmi bolivar terhadap dolar yaitu 50 bolivar sama dengan 1 dolar AS. Keempat, 17 Mei 2016 hingga 1 Januari 2017 untuk keadaan darurat selama 60 hari. Kelima, 15 Januari 2017 hingga Desember 2017 tentang pemberian wewenang kepada angkatan bersenjata untuk mendistribusikan dan menjual makanan, serta memotong waktu bekerja di sektor swasta (www.washingtonpost.com).

Sanksi Executive Order 9 Maret 2015

Cara pemerintah Venezuela mengatasi demonstrasi pada Februari 2014 dengan menggunakan kekerasan menyebabkan jatuhnya korban. Organisasi non pemerintah seperti *Foro Penal* dan *Program for Education / Action on Human Rights* (PROVEA) melaporkan terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela selama 2014-2015. Pelanggaran tersebut antara lain, penggunaan kekerasan oleh pihak pemerintah, tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan pers, pelanggaran dalam menanggapi protes anti pemerintahan, tindakan penahanan sewenang-wenang oleh polisi terhadap lawan politik dan warga sipil, serta korupsi publik yang signifikan oleh pejabat pemerintahan.

Melihat situasi tersebut, AS menyatakan terjadinya pelanggaran HAM dan mengeluarkan sanksi *executive order* pada 9 Maret 2015. Pemerintahan AS mengatakan bahwa situasi di Venezuela merupakan *"ancaman tidak biasa dan luar biasa untuk keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS".* Bahasa tersebut merupakan bahasa standar hukum AS dalam mengeluarkan sanksi ke beberapa negara. Pelanggaran HAM yang terjadi juga tidak sesuai dengan nilai demokrasi di dalam *Inter-American Democratic Charter*, dimana AS dan Venezuela merupakan negara anggota OAS yang menyetujui piagam tersebut. Piagam tersebut berisikan bahwa setiap negara anggota yang menganggap bahwa hak asasi manusia telah dilanggar dapat menyajikan klaim atau petisi untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (www.oas.org).

Sanksi dijatuhkan berdasarkan undang-undang AS antara lain, *Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA), *National Emergencies Act* (NEA), serta *Immigration and Nationality Act of 1952* (INA). Dalam lembaran *executive order* menyebutkan bahwa sanksi berupa pembekuan aset dan pemblokiran properti yang ada di Amerika Serikat saat ini dan akan datang, dilarang berbisnis dengan orang Amerika Serikat dan sebaliknya, serta dilarang berkunjung ke Amerika Serikat (www.archives.gov). Namun, pemerintah AS tidak menyebutkan secara detail mengenai aset dan properti yang dimiliki oleh 7 pejabat tersebut di dalam EO tersebut. Departemen Keuangan AS juga tidak mengkonfirmasi jika pejabat tersebut memiliki aset di AS, namun mengatakan ada jangka waktu 10 hari untuk melaporkannya ke Departemen Keuangan AS pasca sanksi dikeluarkan dan hingga saat ini belum ditemukan aset maupun properti yang dimiliki pejabat tersebut di AS. (money.cnn.com).

Sanksi diperbarui dan diperpanjang 3 Maret 2016 hingga 2019 oleh pemerintahan AS. Tambahan dari isi sanksi tersebut menegaskan bahwa setiap perusahaan, baik asing dan domestik, yang melakukan bisnis di Venezuela harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak berhubungan dengan pihak yang ditunjuk. Setiap pihak selain warga AS, juga dapat diblokir jika mereka membantu materi, sponsor, atau dukungan teknologi, barang atau jasa kepada pejabat yang terkena sanksi (www.treasury.gov). Sanksi AS yang berlaku efektif sejak 9 Maret 2015 hingga 2019 ini, dapat mempengaruhi perdagangan antara Venezuela dan Amerika Serikat untuk yang akan datang (www.avalonrisk.com).

Alasan Amerika Serikat Menjatuhkan Sanksi Executive Order

A. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor dari dalam AS yang menjadi alasan pemerintahan AS di bawah pimpinan Barack Obama memberikan sanksi *executive order* terhadap 7 pejabat Venezuela yang berlaku pada 9 Maret 2015 hingga 31 Desember 2019, yaitu:

1. Nilai Demokrasi AS

   Faktor non masyarakat berasal dari paham yang dianut oleh AS yaitu paham Demokrasi Liberal. Dimana, Liberal sangat melindungi HAM, membatasi kewenangan pemerintah, dan menekankan kedaulatan rakyatnya, serta kebebasan individu. Teori hak asasi manusia oleh John Locke dan beberapa tokoh Inggris dan Perancis mendorong lahirnya tulisan dari Thomas Paine (1737-1809) – *The Rights of Man*, yang mengagungkan betapa mulianya kekuatan nalar dan pentingnya persamaan hak bagi seluruh manusia. Pemikiran semacam ini terdapat pula dalam *Declaration of Independence* (1776) yang ditulis oleh Thomas Jefferson (1743-1826). Isi dari deklarasi tersebut yaitu manusia diciptakan oleh yang Maha Kuasa sebagai makhluk yang sederajat dan memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan memperoleh kebahagiaan (Albertine Minderop:2006).

   Berdasarkan batasan di atas, menguatkan paham liberal di AS. Liberalisme mencakup bidang politik (demokrasi), ekonomi (kapitalisme), dan terkait dengan harkat manusia (individualisme). AS merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi liberal, dimana demokrasi adalah penghargaan

setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia (Albertine Minderop:2006). Dalam perspektif AS, demokrasi harus dilestarikan, dipertahankan, dan disebarluaskan keseluruh penjuru dunia, termasuk di Venezuela. Oleh karena itu, AS ingin menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan Venezuela, didasarkan pada penghormatan terhadap HAM dan mendukung rakyat Venezuela untuk memajukan demokrasi perwakilan, HAM, dan aturan hukum.

Namun dalam penerapannya, selain tujuan tersebut AS mengharapkan manfaat di balik itu, yakni bila negara lain menganut paham yang sama, maka berbagai hubungan diplomatik menjadi lebih lancar dan saling menguntungkan. Untuk mencapai tujuan ini, AS melakukan berbagai cara. Seperti ikut campur dalam urusan dalam negeri Venezuela dengan memberikan sanksi terhadap 7 pejabat pada 9 Maret 2015 akibat pelanggaran HAM. Tujuan dari sanksi adalah untuk membujuk pemerintah Venezuela agar mengubah paham mengenai HAM yang dianutnya. Sikap AS dalam mempertahankan demokrasi di era globalisasi dengan berbagai cara, sehingga kadang menimbulkan konflik dengan negara lain. Seperti akibat pemberian sanksi tersebut, hubungan AS-Venezuela mengalami ketegangan dan sanksi AS mendapat respon negatif dari negara yang menganut paham seperti Venezuela, yaitu Kuba.

2. Perusahaan AS

   Perusahaan dari AS yang merupakan faktor masyarakat juga termasuk faktor yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan Obama memberikan sanksi *executive order*. Pada 2015 perusahaan aluminium swasta dari AS yaitu *Aleris* disulitkan dalam mengimpor aluminium dari Venezuela, dengan cara memperlambat menyetujui izin impor, permintaan valuta asing, dan dokumen lainnya oleh CVG yang dipimpin oleh Justo José Noguera Pietri di bawah CORPOVEX. *La Corporación Venezolana de Comercio Exterior S.A* (CORPOVEX) merupakan perusahaan perdagangan luar negeri Venezuela yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan devisa, ekspor, impor dan investasi asing.

   Perusahaan tersebut mewajibkan semua dokumen dalam bahasa Spanyol, faktur harus asli, wujud dari barang impor dan daftar muatan harus rangkap empat, asuransi dan ongkos kirim harus dicantumkan secara terpisah pada faktur, faktur harus diduplikat dan mencantumkan nilai per unit dan nilai total kiriman, serta uraian barang dagangan harus mencantumkan tarif yang sesuai (www.export.gov). Namun, permintaan impor dari *Mercado Común del Sur* (MERCOSUR) dan negara Karibia dilaporkan ditangani dan disetujui lebih cepat daripada permintaan impor dari AS. Hal tersebut mengakibatkan beberapa perusahaan dari AS mengurangi impor aluminium dari Venezuela pada 2016. Dapat dilihat pada tabel berikut: (www.ustr.gov)

Tabel 4.1 Ekspor dan Impor AS-Venezuela 2015 dan 2016

No.	Kategori Ekspor	Jumlah (Dolar AS) 2015	Jumlah (Dolar AS) 2016	Kategori Impor	Jumlah (Dolar AS) 2015	Jumlah (Dolar AS) 2016
1	Bahan bakar mineral	2,2 miliar	1,7 miliar	Bahan bakar mineral	15 miliar	10 miliar
2	Mesin	1,5 miliar	868 juta	Bahan kimia organik	201 juta	114 juta
3	Bahan kimia organik	598 juta	312 juta	Aluminium	90 juta	81 juta
4	Mesin listrik	596 juta	289 juta	Pupuk	66 juta	4 juta

Sumber: diolah oleh penulis dari https://ustr.gov/countries-regions/americas/venezuela

Terlihat pada tabel tersebut, bahwa pada 2016 terjadi penurunan impor aluminium oleh AS sebesar 9 Juta Dolar AS, karena perusahaan Aleris merupakan perusahaan yang cukup besar dalam mengimpor aluminium (www.ustr.gov). Penurunan ekspor dan impor tersebut terjadi pasca turunnya harga minyak dunia disertai pemberian sanksi AS. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dari AS disulitkan dalam mengimpor barang, di samping itu perusahaan AS maupun dari luar AS harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak berhubungan dengan pihak yang ditunjuk dan tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan perdagangan dengan Venezuela terkait sanksi tersebut.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar AS yang juga mempengaruhi Barack Obama dalam memberikan sanksi *executive order* terhadap 7 pejabat Venezuela masa pemerintahan Maduro, yaitu:

1. *Inter-American Democratic Charter*

   Nilai demokrasi di dalam *Inter-American Democratic Charter* merupakan faktor dari masyarakat lain yang mempengaruhi pemberian sanksi. AS dan Venezuela merupakan negara anggota OAS yang meyepakati piagam tersebut. Isi piagam menyebutkan bahwa setiap negara anggota yang menganggap bahwa hak asasi manusia telah dilanggar dapat menyajikan klaim atau petisi untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (www.oas.org). Dimana, pelanggaran HAM yang terjadi di Venezuela pada aksi protes Februari 2014 tidak sesuai dengan isi piagam tersebut. Kemudian, berdasarkan UU dan piagam tersebut, senat AS memberikan wewenang kepada Obama untuk menjatuhkan sanksi *executive order* pada 9 Maret 2015.

   Beberapa pasal dari *Inter-American Democratic Charter* menjadi alat yang dipakai oleh AS untuk menjatuhkan sanksi *executive order* 9 Maret 2015.

Terlihat pada beberapa pasal yang mepertegas hal tersebut, salah satunya dapat dilihat pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa: (www.oas.org)

Pasal 1, rakyat Amerika memiliki hak untuk demokrasi dan pemerintah mereka memiliki kewajiban untuk mempromosikan dan mempertahankannya. Demokrasi sangat penting bagi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi rakyat Amerika.

Piagam tersebut cukup penting, tidak hanya dibuat agar orang bisa menyadari hak mereka, tetapi juga dibuat agar mereka sadar atas mekanisme untuk membela diri. Dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang dikenai sanksi, tidak mencerminkan adanya demokrasi di Venezuela. Terutama kebebasan untuk rakyat dalam berpendapat dan menyampaikan aspirasi akibat dari terjadinya krisis ekonomi di Venezuela pada 2014. Rakyat memiliki hak untuk membela diri dalam bentuk aksi protes terhadap pemerintahan Maduro sesuai dengan isi dari piagam tersebut. Seharusnya, pemerintahan terutama pejabat militer menegakkan demokrasi dengan cara tidak melakukan kekerasan dan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Demokrasi juga menjadi tolak ukur di negara-negara Amerika terutama anggota OAS untuk melihat seberapa maju atau tidaknya negara-negara tersebut. Namun, kurangnya promosi dan pertahanan demokrasi di Venezuela membuat keadaan negara tersebut mengalami kesenjangan ekonomi, sosial dan politik. Terlihat dengan terjadinya kekurangan bahan kebutuhan pokok, medis, dan energi, serta aksi protes di jalanan dan terbaginya dua kubu di pemerintahan.

Pemerintahan Maduro juga dilaporkan oleh PROVEA yang merupakan organisasi non pemerintah Venezuela, melakukan beberapa pelanggaran HAM antara lain, korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan Maduro dan membatasi kebebasan pers dan media. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan isi pasal 4 yang mengatur tentang pemerintahan yang harus transparan dan bertanggung jawab serta menghormati hak-hak sosial seperti kebebasan berekspresi. Isi dari pasal tersebut yaitu: (www.oas.org)

Pasal 4, transparansi dalam kegiatan pemerintah, kejujuran, administrasi publik yang bertanggung jawab pada bagian dari pemerintah, menghormati hak-hak sosial, dan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers merupakan komponen penting dari pelaksanaan demokrasi.

Berdasarkan pasal tersebut, tidak sesuai dengan keadaan di Venezuela saat ini, dimana tidak adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan yang menimbulkan korupsi oleh pemerintahan terutama pejabat militer. Di samping itu, pemerintahan tidak memberikan kebebasan berekspresi, seperti yang dilaporkan oleh organisasi non pemerintah, IPYS. Komponen demokrasi harus dijalankan oleh suatu pemerintahan yaitu dengan adanya trasnparansi di pemerintahan dan menghormati hak-hak sosial. Tanpa menjalankan

komponen dari demokrasi tersebut membuktikan bahwa Venezuela tidak melaksanakan isi dari beberapa pasal dalam piagam tersebut.

2. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Fungsional (CANVAS)
   Organisasi masyarakat dan lembaga fungsional berasal dari luar AS yang merupakan organisasi non pemerintah namun, didanai oleh AS yaitu *Center for Applied Non Violent Action and Strategies* (CANVAS). CANVAS berasal dari Serbia yang awalnya berhasil meruntuhkan rezim Milosevic. Salah satu dari pihak oposisi yang menentang pemerintahan Maduro yaitu Leopoldo Lopez merupakan anggota dari CANVAS untuk Venezuela. Inti dari kerja CANVAS adalah untuk menyebarkan slogan "kekuatan rakyat" kepada dunia untuk mencapai kemenangan melawan salah satu diktator, dan misi besarnya yaitu menjelaskan kepada dunia alat apa yang digunakan untuk mencapai kebebasan, demokrasi, dan HAM tanpa kekerasan.

   Pada 2014 kampanye sayap kanan yang menyerukan *"La Salida"* (atau pengunduran diri) terhadap presiden Nicolas Maduro, dipimpin oleh pihak oposisi Leopoldo Lopez dan Maria Corina Machado. Setelah terlibat dalam percobaan kudeta 2002 di Venezuela, sekali lagi mereka melaksanakan aksi protes sampai pemerintahan diganti. Namun, Leopoldo Lopez dan beberapa pihak oposisi lainnya ditangkap oleh Gustavo Enrique González López yang merupakan Direktur Jenderal SEBIN. Organisasi ini bekerja hanya atas permintaan bantuan oleh suatu negara atau pemerintahan, dimana pemerintah AS memiliki kepentingan untuk membentuk perubahan rezim dan pemasangan otokrat kapitalis AS di Venezuela. Pemerintahan AS mengalokasikan dana 5 juta dolar AS untuk mendanai kegiatan oposisi di Venezuela pada aksi protes 2014. Jika Lopez berhasil menurunkan Maduro dari jabatannya, maka AS dan investor barat yang kaya dapat menguasai perusahaan Venezuela terutama pada perusahaan minyak.

   Departemen Luar Negeri AS juga secara jelas menyebutkan bahwa *"Pemerintah Venezuela harus membebaskan semua tahanan politik, termasuk puluhan mahasiswa, pemimpin oposisi Leopoldo Lopez dan Walikota Daniel Ceballos dan Antonio Ledezma",* dan mengabaikan semua bukti yang diajukan oleh pemerintah Venezuela terhadap pihak yang ditahan. Pemerintah AS bersikeras untuk meminta pemerintah Maduro melepaskan tahanan dari aksi protes 2014 dan menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran HAM di Venezuela. Namun kenyataannya bahwa, pelanggaran berat HAM telah dilaporkan terjadi di AS, termasuk pembunuhan polisi terhadap berbagai orang Afrika-Amerika tanpa diberikan konsekuensi hukum terhadap para pelaku. AS juga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap puluhan orang yang ditahan secara sewenang-wenang di Guantanamo. Pemerintahan Obama juga memilih untuk mengabaikan masalah hak asasi manusia yang sangat serius di negara-negara sekutu seperti Meksiko.

   Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nama-nama oposisi yang disebutkan oleh pemerintahan AS memiliki peran yang cukup penting untuk membantu

kepentingan AS di Venezuela, dan salah satu oposisi yang disebutkan tersebut merupakan anggota organisasi non pemerintah, CANVAS yang didanai oleh AS. Di samping itu, pemberian sanksi kepada 7 pejabat tersebut sesudah pemerintahan Venezuela menangkap pihak oposisi pada Februari 2014, dan satu jaksa penuntut yang dikenai sanksi (Katherine Nayarith Haringhton) adalah pejabat yang menuduh dan menuntut pemimpin oposisi Ledezma dan Corina Machado bekerjasama untuk menggulingkan pemerintahan Maduro.

C. Karakteristik Utama dari Organisasi Sosial (USAID dan NED)

United States Agency for International Development (USAID) dan *National Endowment for Democracy* (NED) merupakan faktor karakteristik utama dari organisasi sosial, yang mempengaruhi AS memberikan sanksi *executive order* terhadap 7 pejabat Venezuela masa pemerintahan Maduro. AS terus berupaya melakukan destabilisasi di Venezuela, salah satunya dengan menggunakan organisasi ini. Organisasi tersebut membantu pihak oposisi dengan mendanai gerakan politik di dalam pemerintahan Venezuela.

Organisasi-organisasi dari AS tersebut membiayai gerakan politik di luar negeri, menginvestasikan lebih dari 100 juta dolar AS untuk membangun koalisi anti Chavez di Venezuela selama periode 2002-2011. Meskipun mendapat bantuan besar dari pemerintah AS, oposisi tidak dapat mengumpulkan cukup banyak dukungan untuk menurunkan Chavez melalui pemilihan dan berbagai upaya untuk menggulingkannya, karena mudah dikalahkan oleh para pendukungnya Chavez. Sejak kematiannya di awal 2013 penerusnya, Nicolas Maduro telah menjadi sasaran selanjutnya dari upaya tersebut. Pihak sayap kanan pemerintahan Venezuela, Leopoldo Lopez dan Henrique Capriles Radonski mendapat dukungan keuangan rahasia dari AS melalui USAID untuk merencanakan demonstrasi dan meluncurkan sabotase ekonomi melawan pemerintahan Venezuela (ososabiouk.wordpress.com).

USAID secara teknis sebuah lembaga independen dari AS namun, beroperasi sesuai dengan panduan kebijakan luar negeri Presiden, Sekretaris Negara, dan Dewan Keamanan Nasional. Selama 2014, AS telah menghabiskan lebih dari 18 juta dolar AS melalui USAID dan NED untuk mendanai kelompok anti-pemerintah di Venezuela. Dari 2014-2015 NED menyalurkan hampir 3 juta dolar AS kepada kelompok anti-pemerintah di Venezuela yang berfokus pada pemilihan legislatif 6 Desember 2015. Sebesar 125.000 dolar AS diberikan kepada kelompok oposisi *Súmate*, yang dibuat oleh organisasi tersebut pada 2003 untuk memimpin kampanye *recall referendum* terhadap Presiden Chavez. Pendiri *Súmate*, Maria Corina Machado adalah tokoh oposisi terkemuka. Kelompok Machado terus menerima dana pemerintah AS untuk campur tangan dalam pemilihan Venezuela. Terbukti, pemerintahan AS mendanai untuk membiayai spionase internal di dalam cabang legislatif Venezuela. Kemudian pada 2017, dana yang dikeluarkan oleh USAID sekitar 5,5 juta dolar AS untuk mempertahankan praktik, institusi, dan nilai-nilai demokrasi yang mendukung hak asasi manusia, kebebasan informasi, dan keterlibatan warga Venezuela.

Sesuai dengan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, dalam pemberian sanksi *executive order* yang ditargetkan terhadap individu tersebut menunjukkan bahwa AS berupaya untuk terlihat melindungi dan memelihara demokrasi dan HAM di Venezuela. Pemberian sanksi terhadap pejabat Maduro oleh AS juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya yaitu, upaya AS untuk mendestabilisasi pemerintahan Maduro dan agar Venezuela mengubah ideologi negaranya. Hal tersebut agar AS dan investor kaya lainnya dapat menguasai Venezuela yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas.

Pasca pemberian sanksi, Maduro juga mempromosikan beberapa pejabat dengan jabatan baru antara lain: (www.crowell.com)

Tabel 4.2 Jabatan Baru Pasca Sanksi *Executive Order*

No.	Nama Pejabat	Jabatan Baru (Pasca Sanksi EO)
1	Antonio José Benavides Torres	Komandan Pertahanan Wilayah Strategis Angkatan Bersenjata Nasional Guayana dan Direktur Perusahaan CAMIMPEG (perusahaan minyak, mineral, serta gas milik negara)
2	Gustavo Enrique González López	Menteri Dalam Negeri, Keadilan dan Perdamaian
3	Justo José Noguera Pietri	Direktur Perusahaan SIDOR (perusahaan baja milik negara)
4	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	Wakil Menteri Pencegahan dan Keamanan Warga
5	Miguel Alcides Vivas Landino	Direktur Perusahaan VENETUR (perusahaan pariwisata dan perhotelan milik negara)

Sumber: diolah oleh penulis dari www.crowell.com

Namun, sanksi yang ditargetkan terhadap pejabat Venezuela tidak berjalan sesuai tujuan AS. Pertama, sanksi ini jelas memperlihatkan bahwa semua masalah Venezuela saat ini adalah hasil upaya AS untuk mengacaukan kedaulatan negara tersebut. Kedua, sanksi tidak diterapkan bersama dengan mitra lainnya atau dukungan internasional secara luas, tetapi sanksi diterapkan secara sepihak. Selain itu penerapan awal AS melalui *executive order* yang memberi label kepada Venezuela ancaman terhadap keamanan nasional AS, menghasilkan penolakan di Komunitas Amerika Latin dan Karibia Amerika (CELAC), UNASUR, Kuba, G77 dan Cina (www.telesurtv.net). Hal tersebut membuat sekutu AS tidak ikut bertindak di Venezuela dan menempatkan AS semakin sulit untuk bertindak di Venezuela. Ketiga, tidak ada usaha yang jelas dari AS untuk meringankan masalah yang terjadi di Venezuela. Keempat, para pejabat memiliki beberapa jabatan baru yang meningkatkan kesetiaan para pejabat tersebut terhadap Maduro. Namun, beberapa pejabat yang diberikan jabatan memegang perusahaan pemerintah tetap tidak bisa melakukan bisnis dengan pengusaha domestik maupun dari luar hingga 2019 dikarenakan sanksi AS tersebut.

Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor dalam pemberian sanksi *executive order* oleh Amerika Serikat terhadap tujuh pejabat Venezuela masa pemerintahan Maduro, antara lain:

1. Faktor internal
   Nilai demokrasi AS dimana dalam pandangan AS, demokrasi harus dilestarikan dan disebarluaskan keseluruh penjuru dunia termasuk di Venezuela dan perusahaan AS dimana, salah satu pejabat yang dikenai sanksi menghambat perusahaan AS mengimpor barang dari Venezuela.

2. Faktor eksternal
   Inter-american democratic charter dimana, pelanggaran HAM yang terjadi di Venezuela tidak sesuai dengan nilai demokrasi di dalam piagam tersebut dan organisasi masyarakat dan lembaga fungsional (CANVAS) dimana, salah satu pejabat yang dikenai sanksi menangkap pihak oposisi yang merupakan anggota organisasi non pemerintah didanai oleh pemerintahan AS.

3. Faktor karakteristik utama dari organisasi sosial (USAID dan NED)
   Pemerintahan AS berupaya menggulingkan pemerintahan Maduro menggunakan organisasi di bawah pemerintahan AS.

   Dalam pemberian sanksi tersebut, AS gagal merubah kondisi di Venezuela sesuai tujuan AS, dikarenakan sanksi ini jelas memperlihatkan bahwa semua masalah Venezuela saat ini adalah hasil upaya AS untuk mengacaukan kedaulatan negara tersebut, tidak adanya dukungan internasional dalam pemberian sanksi, dan para pejabat diberikan jabatan baru untuk meningkatkan kesetiaan terhadap Maduro.

Daftar Pustaka

Buku

Minderop, Albertine, *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Rosenau, James N., *International Politics And Foreign Policy, a reader inresearch and theory*, New York, The Free Press, 1969.

Jurnal

Human Right Watch, *World Report 2015 Venezuela*, dalam https://www.hrw.org/world-report/2015/countrychapters/venezuela, diakses 25 September 2016.

Salas, Miguel Tinker, 2015, *VENEZUELA: What Everyone Needs To Know*, dalam http://www.ebook777.com/venezuela-everyone-needs know/, diakses 15 November 2016.

Website

Ekonomi Venezuela Kian Lesu dengan Kebijakan Baru Dolar dan BBM, dalam http://www.beritasatu.com/dunia/350371-ekonomi-venezuela-kian-lesu dengan-kebijakan-baru-dolar-dan-bbm.html, diakses 9 Maret 2017.

Executive Order 13692 of March 8, 2015 Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela, dalam https://www.archives.gov/federal-register/executiveorders/2015.html, diakses 25 September 2016.

INTER-AMERICAN DEMOCRATIC CHARTER, dalam http://www.oas.org/charter/docs/resolution1_en_p4.htm, diakses 26 Januari 2017.

President Obama slaps sanctions on Venezuela, dalam http://money.cnn.com/2015/03/09/news/economy/united-states-sanctions-venezuela/index.html, diakses 10 Agustus 2017.

The American Presidency Project, dalam https://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php/, diakses 25 September 2016.

Ukraine, Venezuela, and Bosnia: The Struggle Continues, dalam https://ososabiouk.wordpress.com/2014/02/26/ukraine-venezuela-and bosnia-the-struggle-continues/, diakses 10 April 2017.

UN Group Rejects US Sanctions Against Venezuela", dalam https://www.telesurtv.net/english/news/UN-Group-Rejects-US-Sanctions Against-Venezuela-20160324-0058.html, diakses 15 Agustus 2017.

US DEPARTMENT OF THE TREASURY, dalam https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/fr80_39676.pdf, diakses 30 November 2016.

US 'losing patience' with Venezuela-John Kerry, dalam http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27513752, diakses 27 Januari 2017.

U.S.-Venezuela Trade Facts, dalam https://ustr.gov/countries regions/americas/venezuela, diakses 4 April 2017.

Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, dalam https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2142, diakses 27 Januari 2017.

Venezuela Economy Profile, dalam http://www.indexmundi.com/venezuela/economy_profile.html, diakses 14 November 2016.

Venezuela is Added to the OFAC Sanctions List, dalam https://www.avalonrisk.com/news_150312.html, diakses 9 Maret 2017.

Venezuelan president Maduro given power to rule by decree, dalam https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuelan president -maduro-given-power-to-rule-by-decree/2013/11/19.html, diakses 23 Februari 2017.

Venezuela - Import Requirements and Documentation, dalam https://www.export.gov/apex/article2?id=Venezuela-Import Requirements and-Documentation, diakses 6 April 2017.

Venezuela Inflation Rates Highest In The World Food Prices Sky High, dalam http://www.businessinsider.com/venezuelas-inflation-rates-highest-in-the-world- food-prices-sky-high-2016-8, diakses 14 November 2016.

Venezuela Update: Exchange Controls and Possible International Remedies to Recover Stranded Funds, and OFAC Sanctions, dalam http://www.crowell.com/Practices/C-M-International/news/Venezuela-Update-Webinar-Exchange-Controls-and-Possible-International Remediesto-Recover-Stranded-Funds-and-OFAC-Sanctions-Crowell-Moring-Webinar, diakses 2 Desember 2016.